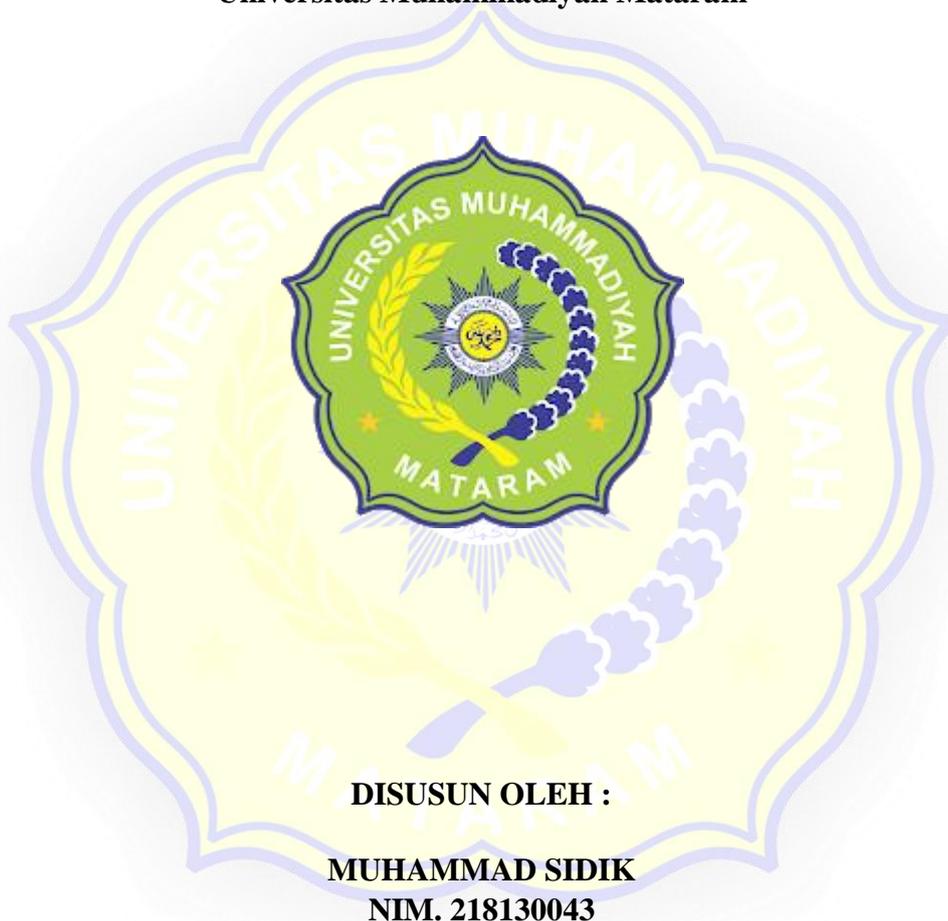


SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA MANTAR UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN SERENTAK
KEPALA DESA TAHUN 2019**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DESA MANTAR UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN SERENTAK KEPALA DESA TAHUN 2019**

Disusun dan diajukan Oleh :

MUHAMMAD SIDIK

218130043

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji Tanggal, 11 Febuari 2022
Mataram

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

Dosen Pembimbing II



Yudhi Lestanata, S. IP., M. IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S. IP., M. IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN PEMERINTAH DESA MANTAR UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN SERENTAK KEPALA DESA TAHUN 2019

Oleh;

MUHAMMAD SIDIK
218130043

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada , Jum'at 10 febuari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

- | | |
|--|--------------|
| 1. <u>Drs. Amil, MM</u>
NIDN. 0831126204 | (PU) (.....) |
| 2. <u>Yudhi Lestanata, S. IP., M. IP</u>
NIDN. 0827118801 | (PP) (.....) |
| 3. <u>M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP</u>
NIDN. 0809039203 | (PN) (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Sidik

Nim : 218130043

Memang benar skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019 adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun,

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Sidik

NIM: 218130043



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SIDIK
NIM : 218130043
Tempat/Tgl Lahir : SABENA, 04 APRIL 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 085 205 167 053
Email : muhammad8sidik0490@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN PEMERINTAHAN DESA MANTAR UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN SERENTAK
KEPALA DESA TAHUN 2019

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 - Maret - 2022

Penulis



MUHAMMAD SIDIK
NIM. 218130043

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A. *Isk*
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SIDIK
NIM : 218130043
Tempat/Tgl Lahir : SAGENA, 04 APRIL 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 205 167 053 / MuhammadSidik0998@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 - Maret - 2022
Penulis



MUHAMMAD SIDIK
NIM.

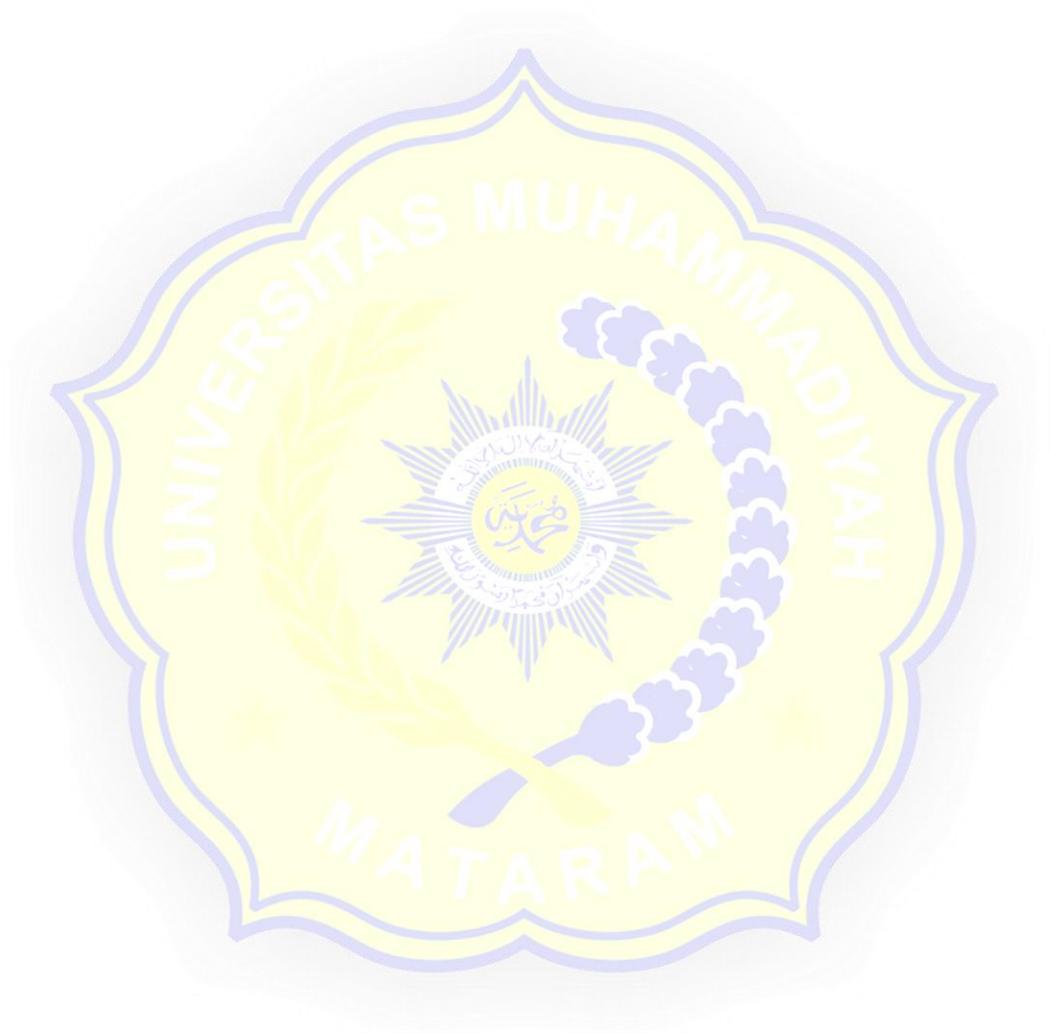
Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jadilah Diri Sendiri”



KATA PENGANTAR

Pertama-tama dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan ridho-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul PERAN PEMERINTAH DESA MANTAR UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN SERENTAK KEPALA DESA TAHUN 2019 dengan baik dan selesai tepat waktu. Tidak lupa pula sholawat serta salam tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun Proposal Skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing sampai dengan tersusunnya proposal skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani., M. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ayatullah Hadi, S.Ip., M.Ip., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. Amil. M.M selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP., selaku dosen pembimbing pendamping dalam dalam penulisan skripsi ini.

6. Terimakasih terlebih khusus kepada kedua orangtua yang sudah memberikan do'a, motivasi, serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik.
7. Terimakasih kepada seluruh keluarga, teman-teman serta rekan-rekan Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan do'a, motivasi, masukan serta semangat hingga dapat terselesainya proposal skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan dapat membantu dalam penulisan laporan selanjutnya supaya lebih baik lagi kedepannya. Sekian dan Terimakasih.

Mataram, 30 Maret 2022

MUHAMMAD SIDIK

Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019

Abstrak:

Secara umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect democracy*) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah baik ditingkat pusat, daerah, maupun ditingkat desa. Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan narasumber menggunakan *Snowball Sampling*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019 telah berjalan dengan baik.



The Role of the Mantar Village Government to Increase Community Participation in Simultaneous Village Head Elections in 2019

Abstract:

Elections are, in general, a means and tool for realizing people's sovereignty, whether directly (direct democracy) or indirectly (indirect democracy) through participation in government administration at the national, regional, and village levels. The village's democracy is accomplished through the community's direct election of the village chief. In the framework of the Village Head Election (Pilkades), democracy can be defined as recognition of community diversity and participatory political attitudes in the context of village democratization. This study employs a qualitative methodology. Methods of data collecting include observation, interviews, and documentation. Snowball Sampling is a technique for determining the origins. According to the findings of study, the Mantar Village Government's role in increasing community participation in the 2019 Simultaneous Village Head Elections has gone successfully.

Keywords: *Community Participation, Simultaneous Village Head Elections*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Secara akademis	6
1.4.2 Manfaat Secara Teoristis	6
1.4.3 Manfaat Secara Praktis	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8

2.2	Landasan Teori	16
2.2.1	Definisi Peran	16
2.2.2	Peran Pemerintah	17
2.3	Kerangka Berpikir.....	34
2.3.1	Definisi Konseptual.....	37
2.3.2	Definisi Oprasional	38

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian	40
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
3.3	Pemilihan Narasumber/Responden.....	40
3.4	Tekhnik Pengumpulan Data	41
3.4.1	Teknik Observasi	41
3.4.2	Teknik Interview	41
3.4.3	Teknik Dokumentasi	41
3.5	Sumber Dan Jenis Data.....	42
3.5.1	Data Primer	42
3.5.2	Data Sekunder	42
3.6	Teknik Analisa Data	44
3.6.1	Reduksi Data	44
3.6.2	Tampilan Data	44
3.6.3	Gambar Kesimpulan	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

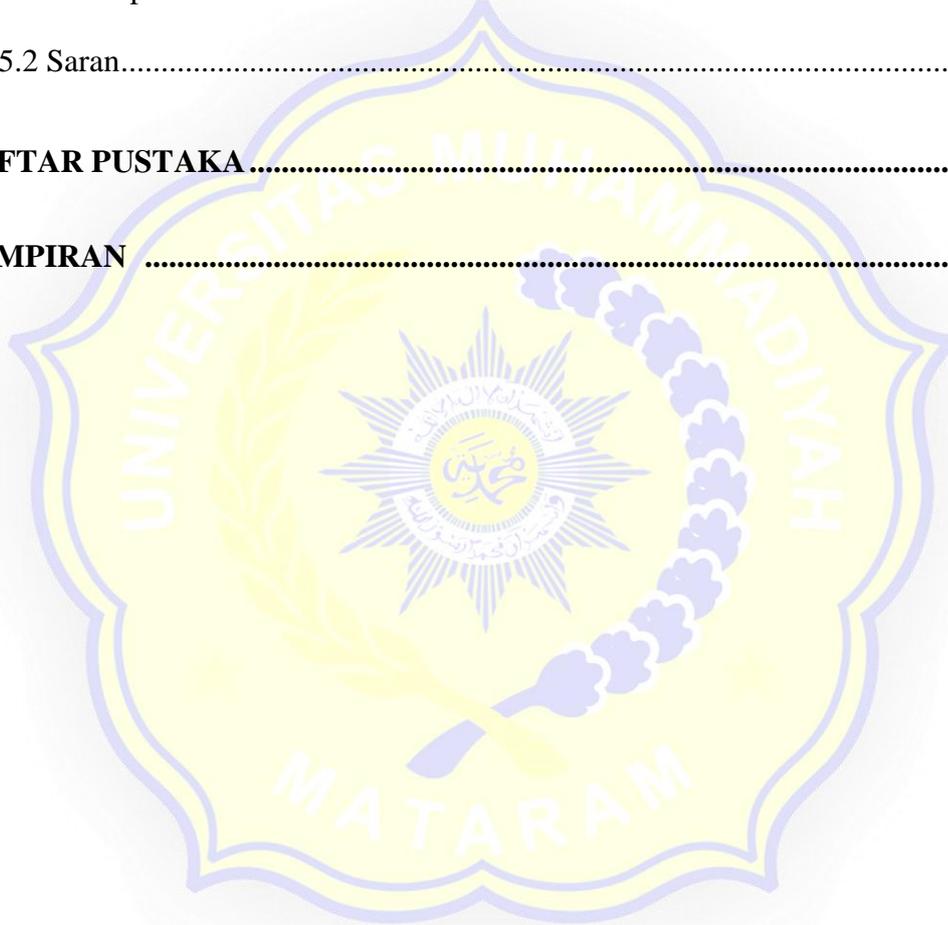
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 48
4.2 Pembahasan..... 54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 69

5.1 Kesimpulan 69
5.2 Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN 72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Ini berarti bahwa semua warga negara memiliki hak dan status yang sama dalam pemerintahan. Dalam hal ini, masyarakat diberi kekuasaan untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan pemerintah. Dengan kata lain, kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa adalah rakyat. Secara umum, pemilihan umum adalah untuk mencapai kedaulatan negara, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun tidak langsung (demokrasi tidak langsung), dalam rangka keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan desa. Demokrasi desa dicapai dengan pemilihan Kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai persepsi keragaman masyarakat dan sikap politik partisipatif dalam konteks demokratisasi di tingkat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa "Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Pemilihan Kepala desa dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 31 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa "(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh

Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Dengan adanya hal tersebut maka telah meletakkan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dan partisipasidalam politik.

Menurut John Locke, hak untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah hak dasar yang diperoleh semua manusia sesuai dengan hak-hak dasar lainnya seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memperoleh. Miliki sesuatu dengan cara alami. Secara lebih operasional, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa rakyatlah yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Robert Dahl menjelaskan bahwa partisipasi efektif masyarakat dengan pilihan yang sama merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh demokrasi agar dapat berfungsi di negara. (Arsil, 2017:3)

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu tingkat desa atau pesta Demokrasi, dan semua masyarakat desa pemilih dapat berpartisipasi dengan memberikan suara atau voting dalam pemilihan calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mendukung pembentukan dan perwujudannya. Perubahan penting dalam kemajuan dan potensi masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan Kepala desa menjadi sangat penting untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan desa..

Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun menurut Undang-Undang Nomor 6 (enam) dan kepala desa dapat dipilih kembali untuk 2

periode. Pemilihan kepala desa tidak hanya mengukur partisipasi masyarakat, tetapi sebagai pengelola negara, pemerintah dapat mengorientasikan kembali partisipasi masyarakat dan membuat keputusan kebijakan yang sah.

Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi para peserta pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan upaya untuk menanamkan keinginan seorang pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa. Dengan memilih seorang Kepala, kepala desa yang terpilih dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di pedesaan dalam hal ekonomi, kesehatan dan pendidikan. (www.kompasiana.com diakses pada 20 November 2021)

Menyelenggarakan pemilihan pemerintah desa tidak terlepas dari partisipasi para peserta pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan upaya untuk menanamkan keinginan seorang pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa. Dengan memilih seorang Kepala, kepala desa yang terpilih dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di pedesaan dalam hal ekonomi, kesehatan dan pendidikan.. (www.kompasiana.com diakses pada 20 November 2021)

Desa Mantal di kecamatan Poto Tano juga merupakan salah satu daerah yang mengikuti pemilihan kepala desa 2019, dan pemilihan kepala desa diadakan dengan partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin desa Mantar di masa depan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Mantar merupakan aset utama bagi terwujudnya Pesta Demokrasi. (www.suarantb.com diakses pada 20 November 2021)

Pemilihan kepala desa di desa Mantar tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan desa. Pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum baik pemilih pemula maupun pemilih tetap guna mengurangi munculnya Golput di masyarakat. Untuk meminimalkan ketidakpercayaan para politisi dan calon pemimpin yang mencalonkan diri dalam pemilu. Upaya pemerintah desa untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa menjadi alasan utama untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Hal ini mencerminkan peningkatan jumlah peserta sebesar 85% dibandingkan dengan pemilihan kepala desa tahun 2013. (lintasntb.com diakses pada 20 November 2021)

Dalam hal Pilkades, pemerintah desa merupakan alat penggerak dan pemajuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat baik pemula maupun masyarakat pemula (Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014). Mempelajari, memahami, dan berusaha melengkapi data-data yang terkumpul pada Pilkada yang dilaksanakan merupakan prasyarat bagi partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Oleh karena itu, lebih banyak orang dengan tanggal yang lengkap akan bergabung dengan Pilkades.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memilih judul **“Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019?
2. Apa saja factor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Sebagai prasyarat dan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan kegiatan penelitian baru yang dapat mendukung pengembangan sistem informasi.
3. Peneliti dapat menambah wawasan dengan menerapkan ilmu teoritis yang diperoleh di lapangan.
4. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi pengembangan atau pembuatan untuk penelitian yang sama.

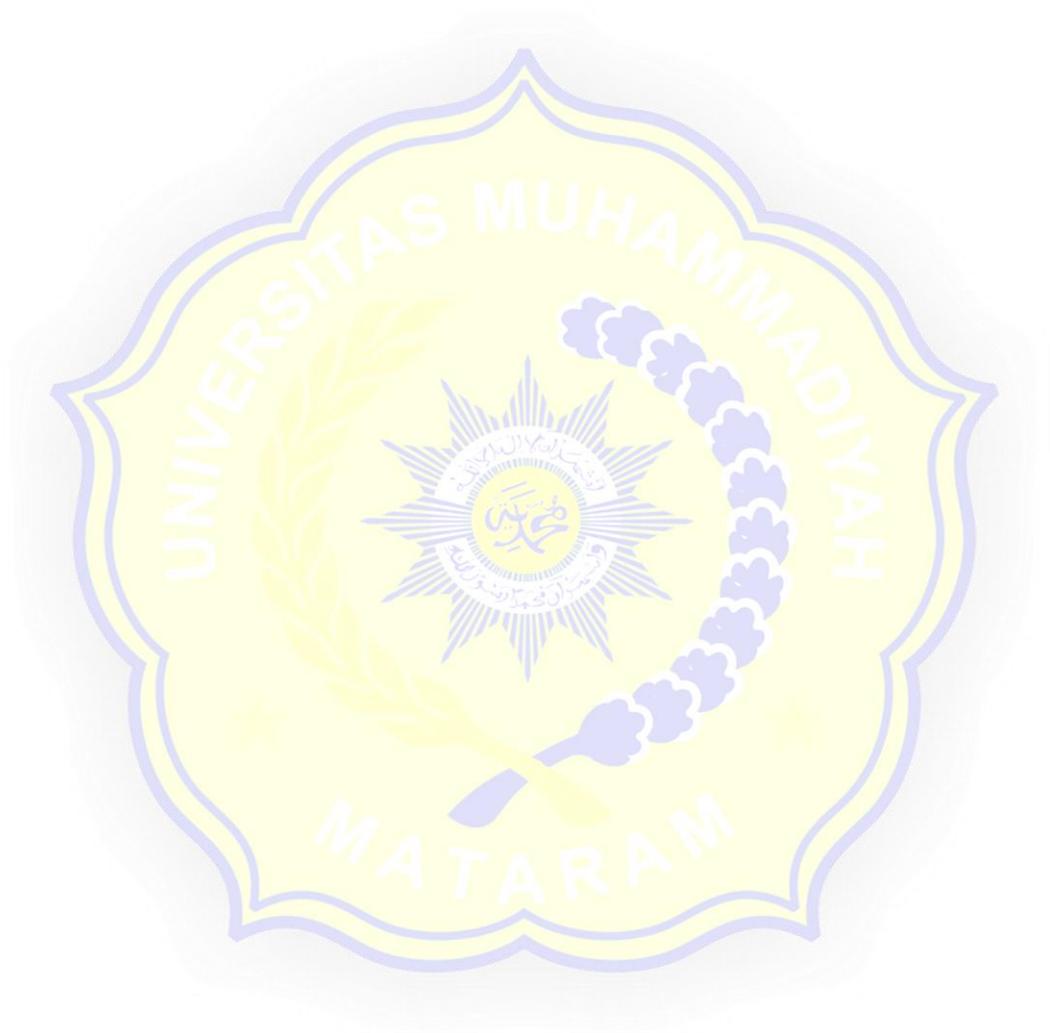
1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah tentang peran Pemerintah Desa Mantal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019.
2. Menjadi bahan edukasi politik bagi masyarakat luas tentang peran Pemerintah Desa Mantal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019

1.4.3 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji peran Pemerintah Desa Mantal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Serentak 2019.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur ilmu politik.

3. Sebagai dasar dan acuan penelitian lebih lanjut terkait peran Pemerintah Desa Mantal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019..



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan dapat menyempurnakan teori yang digunakan untuk memvalidasi penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan makalah penelitian ini, penulis mengkaji dan mengumpulkan informasi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan, baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada. Selain itu, penulis juga menggali informasi dari buku-buku, disertasi dan esai untuk mendapatkan teori judul yang dijadikan landasan teori keilmuan. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, penelitian Septio Widdo (2019) yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Rakyat Desa Lanvin Barat Kabupaten Ogan ilir Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019, Negara dan Pemilihan Pemimpin dalam Kebijakan Pemerintah. Orang-orang yang terlibat dalam partisipasi politik atas dasar pemikiran bahwa mereka dapat mengarahkan kepentingan dan kebutuhan mereka, atau setidaknya memenuhinya. Semakin tinggi partisipasi politik, semakin banyak orang yang mengikuti, memahami, dan terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Partisipasi politik yang rendah, sebaliknya, biasanya menunjukkan bahwa masyarakat kurang memiliki kesadaran dan minat terhadap isu dan kegiatan pemerintah. Perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi politik ini, karena banyak orang yang tidak setuju dengan tingginya partisipasi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor dominan peran

Kepala desa Karang dalam Barat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2019. Metode yang digunakan peneliti untuk memperjelas peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa Karang dalam tahun 2019 ini menerapkan tujuan peneliti terjun ke lapangan (field research), yaitu sumber data berupa pertanyaan langsung kepada responden dan langsung pengamatan oleh peneliti. Teori yang digunakan peneliti adalah teori partisipasi politik yang dikenal dengan istilah Desa Plosok yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat Kepala desa, namun pada hakikatnya sangat kolaboratif. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat desa Kuang dalam Barat pada pemilu legislatif 2019, hingga 98% dibandingkan tahun 2014 yang hanya 67,50%. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kepala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum 2019 turut membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat..

Kedua, penelitian Putri Ningrum Nilamsari (2018) yang berjudul *Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Luwu*. Temuan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sebagai sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat di Pankashira dan pemerintahan negara demokratis berdasarkan UUD 1945 dapat menjamin hak-hak politik warga negara dan masyarakat. Menunjukkan apa yang perlu ditingkatkan. Perlu terselenggaranya pemilihan umum yang profesional dengan integritas, kompetensi dan integritas, serta akuntabilitas. Hasil dan pemilihan kepala daerah dan kepala daerah secara langsung adalah bahwa dengan memperluas partisipasi politik

progresif melalui hak pilih universal, masyarakat memainkan peran nyata dalam menentukan nasib daerah. Hak pilih universal adalah cara untuk mencapai kehidupan yang demokratis. Meningkatkan partisipasi publik berarti meningkatkan jumlah warga negara yang menikmati hak dan kebebasan politik. Penelitian ini dilakukan di Komite Umum Kabupaten Luwu (KPU). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian kualitatif secara deskriptif. Tujuan investigasi ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup peran KPU dalam setiap pemilukada di kabupaten Luwu. Berdasarkan temuan, peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah KPU Kabupaten Luwu melibatkan berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kelompok marginal, penyandang disabilitas dan berbagai sosialisasi. strategi untuk membuatnya. Buat formulir lain untuk memudahkan masyarakat umum mendapatkan informasi tentang pemilu.

Ketiga, penelitian Hayono Harun dan Svehan Halik (2021) yang berjudul *Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bontoara Kabupaten Gowa*. Dari hasil penyelidikan, pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah Partai Demokrat yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan tokoh di desa Bontoala kecamatan pallangga Kabupaten Gowa. Metode survei yang digunakan adalah survei lapangan dengan pendekatan sosiologis. Hasil survei ini menyimpulkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat dalam pemilihan tokoh di desa Bontoara harus berfungsi sebagai organisasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pengaruh di pusat

masyarakat dan oleh karena itu melibatkan tokoh masyarakat sebagai panitia. Oleh karena itu, keberhasilan pemilihan kepala desa juga sangat tergantung pada tingkat partisipasi tokoh masyarakat. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat telah memilih menjadi tim pemenangan calon kepala desa. Penyelenggaraan pilkada desa tidak bertentangan dengan syariah dan pada hakikatnya sejalan dengan konsep Asisula, namun karena mekanisme tersebut sebenarnya hanya merupakan metode pemilihan dalam pemilihan pimpinan maka menggunakan sistem pemilihan langsung.

Keempat, survei bertajuk *Tingkat Partisipasi Masyarakat (2018) dalam Pemilihan Kepala Desa Semuntai 2014 yang dilakukan oleh Juli dan Pauls*. Dari hasil survei, permasalahan umum yang ditemui di daerah ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Semuntai. Ini masih rendah. Padahal, partisipasi yang tinggi, meski dalam skala kecil, menggambarkan gambaran positif keterlibatan masyarakat pendukung Pesta Demokrasi selama lima tahun. Jika masyarakat di daerah yang lebih kecil menunjukkan peningkatan tingkat partisipasi, pemilihan umum yang lebih luas kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan, sehingga menghasilkan suara yang lebih rendah. faktor-faktor yang mendukung dan menghambat masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa Semuntai tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keterlibatan masyarakat masih relatif rendah, tetapi tidak begitu penting. 2) Faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat

antara lain: Keinginan untuk menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Faktor pendukung lainnya adalah relatif banyak masyarakat yang sadar bahwa mereka menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung. 3) Hambatan partisipasi masyarakat adalah kurang maksimalnya sosialisasi politik oleh calon Kepala, yang kecewa karena pembangunan yang dinikmati tidak sesuai harapan, dan yang kecewa tidak bisa meninggalkannya. Saya harus jalan kaki karena saya sedang bekerja karena jarak yang jauh.

Kelima, Sebuah studi oleh Reunisah Darwanti (2019), dengan *peran sukarelawan demokratis untuk meningkatkan partisipasi pemilihan 2019 di kota Padangsidimpuan*. Peran relawan demokrasi PadangSidimpuan dalam peningkatan partisipasi dalam pemilihan umum di sisi Padangsidimpuan di masyarakat setempat adalah bahwa peran sukarelawan Demokrasi PadangSidimpuan secara langsung disosialisasikan dalam basis 10 berdasarkan Itu terbagi. Melakukan tugas sukarelawan demokrasi untuk menyebarkan pembentukan dan pemilihan pemilih dalam bentuk publik. Dalam menghadapi diskusi kelompok, simulasi, kuliah, sosialisasi bahan untuk media sosial. Faktor yang menghalangi sukarelawan demokrasi dalam peningkatan partisipasi dalam pemilihan umum 2019 di kota Padang sidimpuan adalah penghalang yang berasal dari faktor sosial demokrasi. Sosialisasi, latar belakang anggota sukarelawan demokratis, program yang tidak terstruktur. Sukarelawan demokrasi dan masa kerja sukarelawan demokrasi dengan yang waktu singkat. Dan bahkan rintangan yang berasal dari garis besar masyarakat, bahkan hambatan yang berasal dari garis besar masyarakat, komunitas untuk pemilihan, kesulitan, pemilihan, kesulitan

dalam berkomunikasi dari sukarelawan demokrasi dan juga kurang dalam bentuk teknis. Pembatasan untuk memilih seperti dengan A5, tidak ada KTP dan mentoring jika dipilih. Survei ini menggunakan survei deskriptif kualitatif. Ini adalah metode survei yang digunakan dalam melakukan survei ini. Jenis survei ini menggunakan survei lapangan, yaitu survei yang langsung menuju lokasi survei tersebut.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Septio Widodo (2019)
	Judul	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019
	Metode Penelitian	Metode (<i>fiel research</i>) yang berarti terjun kelapangan
	Hasil	Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat desa Kuandalam Barat pada pemilu legislatif 2019, hingga 98% dibandingkan tahun 2014 yang hanya 67,50%. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum 2019 turut membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat..
	Relevansi	Relevansi penelitian ini terletak pada upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, perbedaan dari penyelidikan masa depan adalah pada fokus penyelidikan. Survei ini memperluas cakupan survei ini karena berkaitan dengan lebih banyak pemilihan parlemen..
	Critical Point	Hasil survei ini tidak menunjukkan seberapa jelas pelayanan Kepala untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara garis besar.
2.	Nama Peneliti	Putri Ningrum Nilamsari (2018)
	Judul	Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Luwu
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif
	Hasil	Berdasarkan temuan, peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah KPU Kabupaten Luwu

		melibatkan berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kelompok marginal, penyandang disabilitas dan berbagai sosialisasi. strategi untuk membuatnya. Menerapkan formulir untuk memudahkan masyarakat umum memperoleh informasi tentang pemilu.
	Relevansi	Kesamaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang sama membahas partisipasi politik masyarakat..
	Critical Point	Terlalu banyak terdapat istilah-istilah baru yang dapat membuat pembaca menjadi bingung.
3.	Nama Peneliti	Hayono Harun dan Subehan Khalik (2021)
	Judul	Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa
	Metode Penelitian	Penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi
	Hasil	Hasil survei ini menyimpulkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat dalam pemilihan tokoh di desa Bontoara harus berfungsi sebagai organisasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pengaruh di pusat masyarakat dan oleh karena itu melibatkan tokoh masyarakat sebagai panitia. Oleh karena itu, keberhasilan pemilihan kepala desa juga sangat tergantung pada tingkat partisipasi tokoh masyarakat. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat telah memilih menjadi tim pemenangan calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat dan pada dasarnya sesuai dengan konsep Asisula, namun karena mekanismenya sebenarnya hanya pilihan metode dalam pemilihan kepala desa, maka kami menggunakan sistem pemilihan langsung..
	Relevansi	Relevansi pada penelitian yaitu pada peran dalam pemilihan kepala desa.
	Critical Point	Dari hasil penelitian ini tidak tertera tahun pemilihan kepala desa, serta masih menggunakan UU otonomi daerah yang menjadi landasan penulisan.
4.	Nama Peneliti	Juri dan Paulus (2018)
	Judul	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Semuntai Tahun 2014
	Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keterlibatan masyarakat masih relatif rendah, tetapi tidak begitu penting. 2) Faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat antara lain: Keinginan untuk menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Faktor pendukung lainnya adalah relatif banyak masyarakat yang sadar bahwa mereka menggunakan hak pilihnya

		saat pemilu berlangsung. 3) Hambatan partisipasi masyarakat adalah kurang maksimalnya sosialisasi politik oleh calon Kepala, yang kecewa karena pembangunan yang dinikmati tidak sesuai harapan, dan yang kecewa tidak bisa meninggalkannya. Saya harus jalan kaki karena saya sedang bekerja karena jarak yang jauh.
	Relevansi	Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
	Critical Point	Masih terdapat banyak kesalahan pada penulisan kata-kata.
5.	Nama Peneliti	Reunisah Darwanti (2019)
	Judul	Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padangsidempuan
	Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif
	Hasil	Relawan Demokrat melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilihan umum dengan cara sebagai berikut dalam menjalankan tugasnya: Tatap muka, diskusi kelompok, simulasi, ceramah, posting materi yang disosialisasikan ke media sosial. Dan faktor yang membuat relawan demokrasi tidak meningkatkan partisipasi pada pemilihan umum 2019 di Padangsidempuan adalah kendala yang ditimbulkan oleh relawan internal demokrasi. Pendek kata, masih banyak relawan demokrasi yang tidak percaya diri untuk memberikan materi sosialisasi. Program dijalankan oleh sukarelawan demokratis, dan jangka pendek sukarelawan demokratis. Selain itu, kendala yang muncul dari faktor eksternal: kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pemilu, sulitnya berkomunikasi dari relawan demokrasi kepada penyandang disabilitas, dan juga, pendaftaran A5, kurangnya KTP, dukungan voting, dan hambatan teknis lainnya untuk memilih.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini adalah bagaimana perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun perbedaan dari penelitian selanjutnya terletak pada fokus penelitiannya. Kajian ini lebih luas karena berkaitan dengan pemilihan umum..
	Critical Point	Referensi yang digunakan masih ada yang terlalu jauh dari tahun terbit referensi jurnal ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Definisi Peran

Teori Peran (Sarwono, 2015: 215) adalah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi, gabungan dari berbagai teori, arah, dan disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater. Pelaku teater diharapkan berperan sebagai tokoh tertentu dan berperan sebagai tokoh. Satu arah. Kedudukan aktor dalam teater sama dengan masyarakat dan keduanya berada pada kedudukan yang sama.

Dari penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi seseorang dan perilaku yang diharapkan, tidak sendirian, tetapi selalu dalam kaitannya dengan orang itu atau kehadiran orang lain yang menjadi aktor. Ketika aktor menyadari struktur sosial yang mereka tempati, mereka selalu tampak "berkualitas" dan mencoba untuk dianggap oleh aktor lain sebagai "tidak menyimpang" dari sistem harapan yang ada di masyarakat. (Sarwono, 2015:215)

Setiap orang dalam kehidupan memiliki peran dan fungsi setiap orang dalam menjalankan kehidupan. Setiap orang memiliki peran dan tindakan yang berbeda dalam menjalankan perannya. Menurut Poerwaarminta (Cahya, 2017:22), peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam keadaan atau peristiwa tertentu. Tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang dan merupakan penduduknya. Atau memiliki posisi tertentu dalam urutan tertentu.

Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan perannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola hidupnya. Ini juga berarti bahwa perannya menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan peluang apa yang ditawarkan masyarakat kepadanya. (Soekanto. 2013:212-213)

2.2.2 Peran Pemerintah

2.2.3 Jenis-Jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis yaitu (Fahrizal, 2019:35):

1. Peran yang dilakukan adalah cara yang sebenarnya dilakukan oleh individu atau sekelompok orang ketika melakukan peran tersebut.
2. Peran yang ditentukan adalah cara masyarakat mengharapkan kita untuk melakukan peran tertentu.
3. Konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang memegang lebih dari status yang membutuhkan harapan dan tujuan dari peran yang bertentangan.
4. Kesenjangan peran adalah implementasi emosional dari peran.
5. Kegagalan peran adalah kegagalan seseorang untuk melakukan peran tertentu.
6. Seorang panutan adalah seseorang yang meniru, meniru, dan mengikuti.

7. Seperangkat atau ruang lingkup peran (role set) adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain ketika melakukan suatu peran.
8. Ketegangan peran adalah suatu kondisi yang terjadi ketika sulit untuk mencapai harapan dan tujuan dari peran yang dilakukan karena kontradiksi yang saling bertentangan..

2.2.4 Teori Kepemimpinan

Menurut Ordway Tead, kepemimpinan adalah aktivitas yang mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi mereka yang berusaha untuk mencapai tujuan politiknya.. (Kartono, 2011:57).

2.2.5 Tipe-Tipe Kepemimpinan

Ada beberapa tipe kepemimpinan yang diutarakan oleh G.R Terry (Suswanto dan Priansa, 2011:156) yaitu:

1. Kepemimpinan Pribadi (*Personal Leadership*)

Pada tipe ini pemimpin memiliki hubungan langsung dengan bawahannya, sehingga terbentuk hubungan pribadi yang baik.

2. Kepemimpinan Non-Pribadi (*Non-Personal Leadership*)

Pada tipe ini, Anda terlibat langsung dengan bawahan Anda melalui perencanaan dan instruksi tertulis.

3. Kepemimpinan Otoriter (*Authoritarian Leadership*)

Dalam tipe ini, pemimpin memperlakukan bawahannya secara tidak terencana. Oleh karena itu, bawahan sebenarnya menjalankan perintah bukan dari tanggung jawab tetapi dari rasa takut.

4. Kepemimpinan Kebapakan

Jenis kepemimpinan ini tidak meminta bawahan bertanggung jawab untuk membuat keputusan mereka sendiri, karena mereka selalu didukung oleh para pemimpin. Ini mengarah pada fakta bahwa pekerjaan pemimpin terakumulasi karena semua masalah yang sulit didelegasikan kepadanya.

5. Kepemimpinan Demokratis (*Democratic Leadership*)

Kepemimpinan demokratis berpusat pada orang dan memberikan bimbingan yang efektif kepada pengikut. Adanya koordinasi kerja di antara semua bawahan, dengan menitikberatkan pada tanggung jawab internal (untuk diri sendiri) dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini terletak pada partisipasi aktif anggota kelompok, bukan “individu atau pemimpin individu”. Kepemimpinan yang demokratis menghargai potensi setiap individu, siap mendengarkan nasihat dan saran bawahannya, dan mengakui keahlian profesionalnya. Anda dapat menggunakan kemampuan setiap anggota seefektif mungkin pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang tepat.

6. Kepemimpinan Bakat (*Indigenous Leadership*)

Tipe pemimpin ini memiliki kemampuan untuk mengajak dan mengikuti orang lain. Bawahan itu menyenangkan, jadi mereka mau menuruti perintah yang diberikan.

Perwujudan internal dari tujuan dan fungsi kepemimpinan melibatkan kegiatan kepemimpinan, yang dikategorikan sehingga kepemimpinan dengan polanya masing-masing terlihat jelas. Pemimpin sebagai makhluk ilahi dengan karakter yang berbeda dapat menemukan jalannya sendiri, beberapa tipe atau bentuk yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut (Mattayang, 2019:2-4):

a. Tipe Otoritas (Autocrat)

Diktator adalah penguasa mutlak karena diktator berasal dari kata “utus” (sendiri) dan “kratos” (kekuasaan). Kepemimpinan otoritas didasarkan pada kekuasaan mutlak dan paksaan yang harus dipatuhi. Semua perintah dan kebijakan harus diatur dan dijalankan tanpa berkonsultasi dengan bawahan Anda. Pemimpin diktator adalah orang yang sangat egois, dan orang yang sangat egois memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya sehingga apa yang secara subyektif ditafsirkan sebagai kenyataan sesuai dengan keinginannya. Menurut Terry, pemimpin otoriter biasanya serius, teliti dan teliti. Kalau pimpinan bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku agak kaku, padahal semua perintahnya harus dipatuhi bawahannya. Bawahan tidak memiliki hak untuk mengomentari apa yang dilakukan pemimpin, karena ia menganggap bahwa ia bertindak sebagai pengemudi yang bertanggung jawab atas kompleksitas semua organisasi. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, pemimpin otoriter menunjukkan berbagai karakteristik yang menekankan “kekuasaan”, seperti: (1) Kecenderungan untuk memperlakukan bawahan seperti alat lain dari organisasi atau lembaga lain. (2) Mengutamakan arah pelaksanaan dan

penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas dengan kepentingan dan kebutuhan bawahan. (3) Mengabaikan peran bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Tipe Peternalistik

Persepsi pemimpin dari pihak ayah tentang peran mereka dalam kehidupan organisasi dapat dipengaruhi oleh harapan para pengikut mereka. Keinginan ini umumnya mewakili keinginan pemimpin mereka untuk bertindak sebagai ayah pelindung dan digunakan sebagai tempat untuk mengajukan pertanyaan dan menerima instruksi. Dalam hal nilai-nilai organisasi yang dianut, pemimpin dari pihak ayah biasanya mengutamakan nilai kesatuan. Dalam organisasi yang dipimpin oleh pemimpin pihak ayah, kepentingan dan perlakuan yang sama sangat menonjol. Ini berarti bahwa para pemimpin yang terlibat berusaha untuk memperlakukan setiap orang dalam organisasi secara adil dan setara mungkin.

c. Tipe Kharismatik

Tipe pemimpin karismatik ini memiliki daya tarik untuk dapat mempengaruhi orang lain. Jadi pengikutnya banyak. Pemimpin karismatik dikagumi oleh banyak orang, dan pengikut tidak secara khusus menjelaskan mengapa tipe pemimpin karismatik dihargai. Orang cenderung mengatakan bahwa orang-orang tertentu dengan "kekuatan ajaib" menganggap mereka sebagai pemimpin karismatik. Bersama dengan anggota organisasi dan lembaga yang dipimpin oleh tokoh karismatik, beliau terus mengikuti

pemimpin karismatik dan menggunakan bawahan otonom yang tetap setia kepada pemimpin karismatik, serta nilai dan sikap pemimpin karismatik.

d. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan Demokratik adalah berorientasi pada manusia dan menawarkan panduan yang efisien bagi para pendukungnya. Kepemimpinan demokratis harus menghormati setiap orang dan ingin diusulkan dan menyarankan. Para pemimpin demokrasi dihormati dan tidak dihormati, tidak dihormati, tidak takut untuk mempromosikan bawahan mereka untuk mengembangkan kekuatan inovasi dan kekuatan ciptaan mereka. Benar-benar mendengarkan para pemimpin demokratis, terutama dengan saran dan kritik mereka sendiri. Jenis pemimpin demokratis adalah faktor manusia sebagai faktor utama penting pada semua kelompok dan organisasi. Jenis demokrasi ini menunjukkan dominasi perilaku orang tua dan penyelamat, yang mewakili dan mengembangkan suatu organisasi atau kelompok. Pemimpin melibatkan semua anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Pemilik perusahaan semacam itu selalu menghargai pendapat dan kreasi bawahannya. Pimpinan memberikan sebagian tanggung jawab kepada bawahannya untuk melaksanakan program yang ingin dicapai.

e. Tipe Militeristis

Banyak orang menggunakan sistem perintah. Sistem komando dari atas ke bawah sangat ketat dan sangat otoriter, dan bawahan harus selalu patuh. Tipe ini bersifat militer, dan hanya gaya warna yang meniru gaya militer, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, tipe ini menyerupai tipe otoriter.

2.2.6 Sifat-Sifat Pemimpin

2.2.7 Partisipasi Politik

Dalam negara demokrasi, partisipasi politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik negara. Sahid (2011: 175) mengemukakan gagasannya bahwa partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya, jika pemerintahan saat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, maka negara tersebut dapat disebut sebagai negara demokrasi. Di sisi lain, warga negara juga harus menunjukkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak, tingkat demokrasi di negara ini masih diragukan.

Partisipasi politik adalah kegiatan sipil yang sah yang sedikit banyak secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan atau tindakan penyelenggara negara. Padahal pemilih baru sendiri merupakan pemilih pertama yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum (pemilu). Mereka memiliki pengalaman pertama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemilihan presiden dan wakil presiden. (Bakti, 2012:127)

Partisipasi politik sudah menjadi istilah umum dalam ilmu politik, tetapi sering digunakan dengan cara yang berbeda dan mengarah pada pemahaman istilah yang berbeda. Meskipun demikian, sebagian besar ilmuwan politik setuju bahwa partisipasi politik berarti bagaimana komunitas atau masyarakat umum terlibat dalam aktivitas politik. Tujuan utama dari kegiatan politik tersebut adalah

untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
(Sitepu, 2012:92)

Sedangkan Huntington dan Nelson (Sahid, 2011:177), mengungkapkan pendapatnya bahwa partisipasi politik mencakup pada beberapa hal berikut:

- a. Partisipasi politik adalah tentang aktivitas, bukan sikap. Dalam hal ini tidak termasuk faktor subjektif seperti orientasi politik, seperti pengetahuan politik, minat politik, perasaan tentang persaingan atau efektivitas politik, atau pengakuan relevansi politik. Sesuatu seperti sikap dan emosi politik hanya dapat dilihat dalam konteks bentuk perilaku politik, tetapi terpisah dari perilaku politik.
- b. Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi dalam politik adalah untuk individu atau individu dalam peran masyarakat umum, bukan ahli politik seperti pejabat pemerintah, pejabat partai politik, kandidat politik, dan pelobi profesional. Kegiatan ini, yang dikenal sebagai partisipasi politik, terjadi secara sporadis hanya sebagai pekerjaan paruh waktu atau profesional dan memiliki kepentingan sekunder dibandingkan dengan peran sosial lainnya..
- c. Yang disebut kegiatan partisipasi politik hanyalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan bagi pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan politik. Tujuannya adalah untuk mengubah keputusan PNS incumbent, mengganti atau mempertahankan PNS tersebut, dan mengubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan permainan politik. Tujuan

inilah yang membatasi partisipasi politik, baik ilegal maupun tidak. Oleh karena itu, kegiatan seperti protes, huru hara, demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah merupakan bentuk partisipasi politik.

- d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, apakah tindakan mempengaruhi mereka, berhasil atau gagal.
- e. Partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi. Partisipasi otonom adalah kegiatan politik sukarela, dan partisipasi yang dimobilisasi didasarkan pada keinginan yang didorong oleh orang lain.

Menurut Gabriel Almond (Sahid, 2011: 176), partisipasi muncul karena diawali dengan klarifikasi kepentingan pribadi. Peran Anda adalah sebagai aggregator politik (penghalang/pendukung persatuan), yang sangat penting untuk bentuk-bentuk partisipasi politik selanjutnya.

Menurut pernyataan Sherry R. Arnstein yang dikutip oleh Sigit (2013:2728), partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dibagi menjadi delapan tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepada masyarakat. Tingkat partisipasi dari tingkat partisipasi tinggi ke rendah adalah sebagai berikut:

- a. *citizen control*, Masyarakat dapat berpartisipasi dan mengelola seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengatur program dan lembaga yang menjadi kepentingannya. Masyarakat diberdayakan dan dapat bernegosiasi dengan pihak luar yang ingin melakukan perubahan. Kerja sama warga ini terkait

langsung dengan sumber dana untuk mendapatkan dukungan tanpa harus memanggil pihak ketiga..

- b. *Delegated power*, Pada tingkat ini, masyarakat diberdayakan untuk membuat keputusan tentang rencana tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah harus bernegosiasi dengan masyarakat tanpa tekanan dari atas, masyarakat mungkin memiliki kendali atas keputusan pemerintah..
- c. *Partnership*, Masyarakat memiliki hak untuk berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, dan kekuasaan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk alasan ini, kami telah sepakat untuk berbagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan keputusan, pengembangan kebijakan, dan penyelesaian masalah..
- d. *Placation*, Kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk individu yang berbeda dari komunitas yang terkena dampak yang berbeda untuk menjadi anggota badan publik dengan akses khusus ke proses pengambilan keputusan. Bahkan jika usulan tersebut dipertimbangkan dalam pelaksanaan kotamadya, mereka tidak dalam posisi untuk membuat keputusan karena jumlah anggota pemerintah yang relatif kecil dan sedikit..
- e. *Conculation*, Tidak ada jaminan bahwa pandangan yang diungkapkan akan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi masyarakat umum tidak hanya diinformasikan, tetapi juga diundang untuk bertukar pandangan. Metode yang umum digunakan adalah survei pemikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat, dan audiensi atau dengar pendapat masyarakat..

- f. *Informing*, Kekuasaan hanya menginformasikan kepada publik tentang kegiatan yang diusulkan, dan masyarakat tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi hasilnya. Informasi dapat mencakup hak, kewajiban, dan pilihan, tetapi kami tidak memiliki umpan balik komunitas atau kekuatan tawar-menawar. Informasi diberikan pada tahap akhir perencanaan, dan masyarakat memiliki sedikit kemampuan untuk mempengaruhi rencana yang dibuat..
- g. *Therapy*, Kekuasaan membenarkan usulan tersebut dengan kedok keterlibatan masyarakat. Mereka terlibat dalam kegiatan tersebut, tetapi tujuannya adalah untuk mengubah cara berpikir masyarakat, daripada mendengar dari masyarakat itu sendiri..
- h. *Manipulation*, Tingkat partisipasi terendah yang digunakan masyarakat hanya dengan nama. Ini tidak pernah terjadi, tetapi kegiatan manipulasi informasi untuk mendapatkan dukungan publik dan menjanjikan kondisi yang lebih baik.

2.2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Frank Lindedfield (Sahid, 2011: 185), kepuasan finansial merupakan faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Menurutnya, status ekonomi yang rendah membuat masyarakat merasa tersisih dari kehidupan politik, dan mereka yang terkena dampak acuh tak acuh. Tapi ini tidak terjadi pada orang yang aman secara ekonomi.

Surbakti (Sahid, 2011: 185), sebaliknya, menyatakan bahwa ada dua variabel penting yang mempengaruhi tingkat keterlibatan individu. Pertama,

aspek kesadaran politik meliputi pengakuan hak dan kewajiban kewarganegaraan. Misalnya hak politik, hak finansial, hak perlindungan hukum, hak jaminan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menilai dan mengevaluasi pemerintah baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Weimar dalam buku Sastroatmodjo (Sahid, 2011:185-186) mengemukakan terdapat lima penyebab timbulnya partisipasi politik, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan modernisasi di segala bidang kehidupan, semakin banyak orang yang menuntut kekuasaan politik bersama.
- b. Struktur kelas berubah. Persoalan siapa yang berhak berpartisipasi dan mengambil keputusan politik menjadi penting dan mengubah pola partisipasi politik
- c. Pengaruh komunikasi modern dengan kaum intelektual. Ide demokratisasi partisipatif menyebar ke negara-negara baru sebelum berkembangnya modernisasi dan industrialisasi yang matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika ada konflik antara elit, Anda membutuhkan bantuan penduduk. Ada perjuangan kelas melawan bangsawan yang menarik kelas pekerja dan membentuk perpanjangan hak pilih populer di
- e. Keterlibatan negara secara menyeluruh dalam masalah sosial, ekonomi dan budaya. Memperluas cakupan kegiatan pemerintah sering kali merangsang seruan sistematis untuk kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Menurut Sahid (2011:187), ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga, seperti faktor ekonomi, persepsi politik, evaluasi publik terhadap kebijakan pemerintah, dan pengaruh intelektual.

Menurut Angel (Dwiantara, 2019: 31), peningkatan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan partisipasi masyarakat, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap aktivitas sosial yang ada. Orang paruh baya dan lebih tua yang secara moral terobsesi dengan nilai dan norma sosial lebih mungkin untuk berpartisipasi daripada orang dari kelompok usia lain.

b. Jenis kelamin

Nilai-nilai yang telah lama didominasi oleh budaya berbagai negara menyatakan bahwa tempat perempuan pada dasarnya adalah “dapur”. Artinya, di banyak masyarakat, peran perempuan terutama untuk mengurus keluarga, namun lama kelamaan menjadi penting. Gerakan pembebasan dan pendidikan yang lebih baik bagi perempuan mengubah proporsi peran perempuan.

c. Pendidikan

Itu harus menjadi salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sikap masyarakat terhadap lingkungan dan sikap yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan karena pekerjaan seseorang menentukan besarnya pendapatan yang diterimanya. Pekerjaan yang baik dan penghasilan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang dimaksud dengan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Artinya partisipasi dalam kegiatan harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang hidup dalam lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan tersebut mempengaruhi partisipasinya. Semakin lama ia berada di lingkungan tertentu, semakin jelas ia menunjukkan bahwa rasa memilikinya terhadap lingkungan sangat terlibat dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Modernisasi di segala bidang akan mempengaruhi koeksistensi pertanian dan industri, meningkatkan arus urbanisasi, meningkatkan literasi, meningkatkan pendidikan dan mengembangkan media massa dan komunikasi pada umumnya.
- b. Terjadi perubahan struktur kelas dari kelas baru sebagai akibat dari perluasan kelas menengah dan pembentukan pekerja baru, era industrialisasi dan modernisasi.

- c. Pengaruh kaum intelektual dan media modern yang semakin berkembang dari ide-ide baru seperti nasionalisme dan liberalisme membuat tuntutan untuk berpartisipasi dalam pemilu..
- d. Para pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali menang dengan mencari dukungan massa.
- e. Keterlibatan pemerintah secara luas dalam faktor ekonomi, sosial dan budaya. Perluasan ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali mendorong seruan bagi organisasi untuk terlibat dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan. (Sofyan, 2012:30)

Sedangkan Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

- a. Mengenai penerimaan impuls politik, Milbrath menemukan bahwa keterbukaan dan kepekaan terhadap impuls politik melalui kontak pribadi, organisasi, dan media massa mempengaruhi partisipasi dalam aktivitas politik.
- b. Berkaitan dengan karakteristik sosial seseorang meliputi status ekonomi, suku, usia, jenis kelamin, dan kepercayaan (agama). Kepribadian seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif besar terhadap partisipasi politik..
- c. Berurusan dengan sifat dan sistem partai di mana individu tinggal. Bagi mereka yang hidup dalam demokrasi, partai politik cenderung memperjuangkan kepentingan massa atas dukungannya, sehingga massa cenderung terlibat dalam politik.

- d. Adanya perbedaan wilayah, perbedaan tersebut merupakan aspek lingkungan yang mempengaruhi kepribadian individu dan perbedaan perilaku. Perbedaan regional juga memfasilitasi perbedaan dalam perilaku dan partisipasi politik. (Sofyan, 2012:30-31)

2.2.9 Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Sahid (2011: 178179), bentuk partisipasi politik pada umumnya adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu), tetapi secara lebih khusus bentuk partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara pada saat pemilihan umum. Pemilu, tentu saja, datang dalam banyak varietas dan karakteristik. Dari perspektif apa bentuk partisipasi politik ini dilaksanakan?.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terdapat dalam sistem politik terbagi menjadi beberapa tingkatan atau tingkatan yang menunjukkan bentuk partisipasi dan tingkat keterlibatan yang dilakukan warga negara. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan bentuk dan derajat partisipasi politik.

Tabel 2.2

Bentuk dan Derajat Partisipasi Politik Almond

Bentuk	Ruang Lingkup	Derajat
Voting (pemberian suara)	Luas, keputusan pemerintah	Sedang
Informal group (kelompok informal), social movement (pergerakan social)	Aktivitas kolektif, kebijakan umum	Tinggi
Directcontact (kontak langsung)	Spesifik, urusan personal/pribadi	Rendah
Protest activity (aktivitas protes)	Ekspresif, urusan spesifik	Tinggi

Sumber: Sahid, memahami sosiologi politik (Ghalia Indonesia 2011:179)

Berdasarkan bentuk dan derajat partisipasi politik diatas, berikut ini adalah penjelasan dari tabel tersebut.

a. Voting (pemberian suara)

Kampanye pemilu dalam hal ini berarti pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu). Voting memiliki jangkauan yang luas, dan fungsi voting adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, melalui kegiatan pemungutan suara tersebut, masyarakat berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini derajat partisipasi politik berada pada kategori sedang.

b. *Informal group* (kelompok informal) dan *social movement* (pergerakan social)

Bentuk partisipasi politik ini berupa kegiatan kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan mengarahkan aspirasi mereka dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui asosiasi organisasi tertentu untuk membahas berbagai masalah dan mencari solusi. Bentuk partisipasi politik ini disebut partisipasi politik tinggi karena hanya sebagian kecil orang yang terlibat dalam kategori partisipasi politik tinggi.

c. Kontak langsung

Bentuk partisipasi politik ini lebih bersifat pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi/pribadi. Oleh karena itu, tingkat dan derajat partisipasi politik ditampilkan dalam kategori yang lebih rendah karena hanya berlaku untuk kepentingan pribadi.

d. Aktivitas proses

Bentuk partisipasi politik ini dihasilkan dari ketidakpuasan masyarakat atau kelompok tertentu terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini juga dapat berupa demonstrasi dan kekerasan.

Dalam buku teori-teori politik (Sitepu, 2012:100) Michael Rush dan Philip Althof mengklarifikasi bentuk hierarki partisipasi politik: adalah sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari posisi politik atau administratif
- c. Keanggotaan aktif organisasi
- d. Keanggotaan pasif organisasi
- e. Keanggotaan aktif organisasi kuasi-politik
- f. Partisipasi dalam unjuk rasa dan demonstrasi
- g. Partisipasi dalam debat politik informal, minat umum dalam politik
- h. Pemungutan suara
- i. Ketidakpedulian sepenuhnya

2.3 Kerangka Berpikir

Peran dapat dikatakan sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan dari orang yang hidup dalam masyarakat. Peran dalam suatu lembaga mengacu pada kewajiban dan fungsi yang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan pekerjaan seseorang atau lembaga. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut (Arimbi dan Santoso, 2012:56) :

a. Peran sebagai suatu kebijakan

Dampak dari pemahaman ini berargumen bahwa perannya sudah tepat dan merupakan kebijakan yang baik yang perlu dilaksanakan.

b. Peran sebagai strategi

Pendukung peran ini percaya bahwa peran ini adalah strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

c. Peran sebagai alat komunikasi

Peran ini digunakan sebagai sarana atau alat untuk memasukkan input seperti informasi ke dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan masyarakat merupakan masukan yang berharga untuk membuat keputusan yang cepat dan bertanggung jawab. Konsep *responsiveness* senantiasa mengembangkan sikap positif, suportif, kritis dan suportif, peka terhadap kondisi dan kebutuhan lingkungan kerja, serta dapat menangkap dan melayani peluang dan tantangan perilaku kerja yang ada. Seseorang yang unggul dalam pekerjaan. Tanggung jawab adalah nilai yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk perilaku kerja yang memberikan tanggung jawab tidak hanya untuk otoritas, tetapi untuk semua keputusan di tempat kerja.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

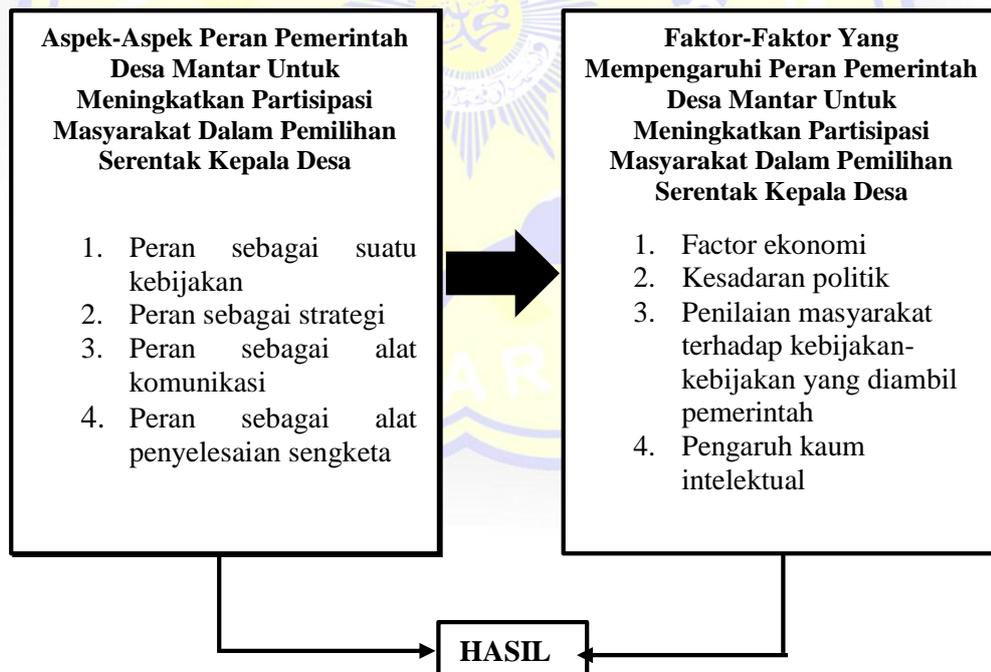
Peran digunakan untuk mengurangi atau mengurangi konflik dengan berusaha mencapai konsensus dari pendapat yang ada. Asumsi yang mendasari persepsi ini adalah bahwa berbagi ide dan pandangan dapat meningkatkan

pemahaman dan toleransi, serta mengurangi ketidakpercayaan dan kebingungan.

Secara umum, partisipasi politik adalah sekelompok individu atau orang yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dengan memilih kepala negara yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah (kebijakan publik). Menurut Sahid (2011:187), ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara, seperti faktor ekonomi, persepsi politik, penilaian publik terhadap tindakan pemerintah, dan pengaruh intelektual.

Bagan 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



2.3.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan kendala masalah variabel yang dijadikan pedoman penelitian untuk mempermudah pekerjaan di lapangan. Selain itu, definisi istilah masih merupakan bentuk istilah, dan meskipun maknanya masih sangat abstrak, itu masih merupakan definisi intuitif.

Agar dapat memahami dan lebih mudah menafsirkan berbagai teori yang ada dalam penelitian ini, peneliti menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan isi kerangka teori peneliti. Selanjutnya, beberapa definisi konseptual terkait dengan apa yang dipertimbangkan dalam proposal ini, antara lain:

a. Peran

Setiap orang dalam kehidupan memiliki peran dan fungsi setiap orang dalam menjalankan kehidupan. Setiap orang memiliki peran dan tindakan yang berbeda dalam menjalankan perannya. Menurut Poerwaarminta (Cahya, 2017:22), peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam keadaan atau peristiwa tertentu. Tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang dan merupakan penduduknya. Atau memiliki posisi tertentu dalam urutan tertentu.

b. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan sipil yang sah yang sedikit banyak secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan atau tindakan penyelenggara negara. Padahal pemilih baru sendiri merupakan pemilih pertama yang

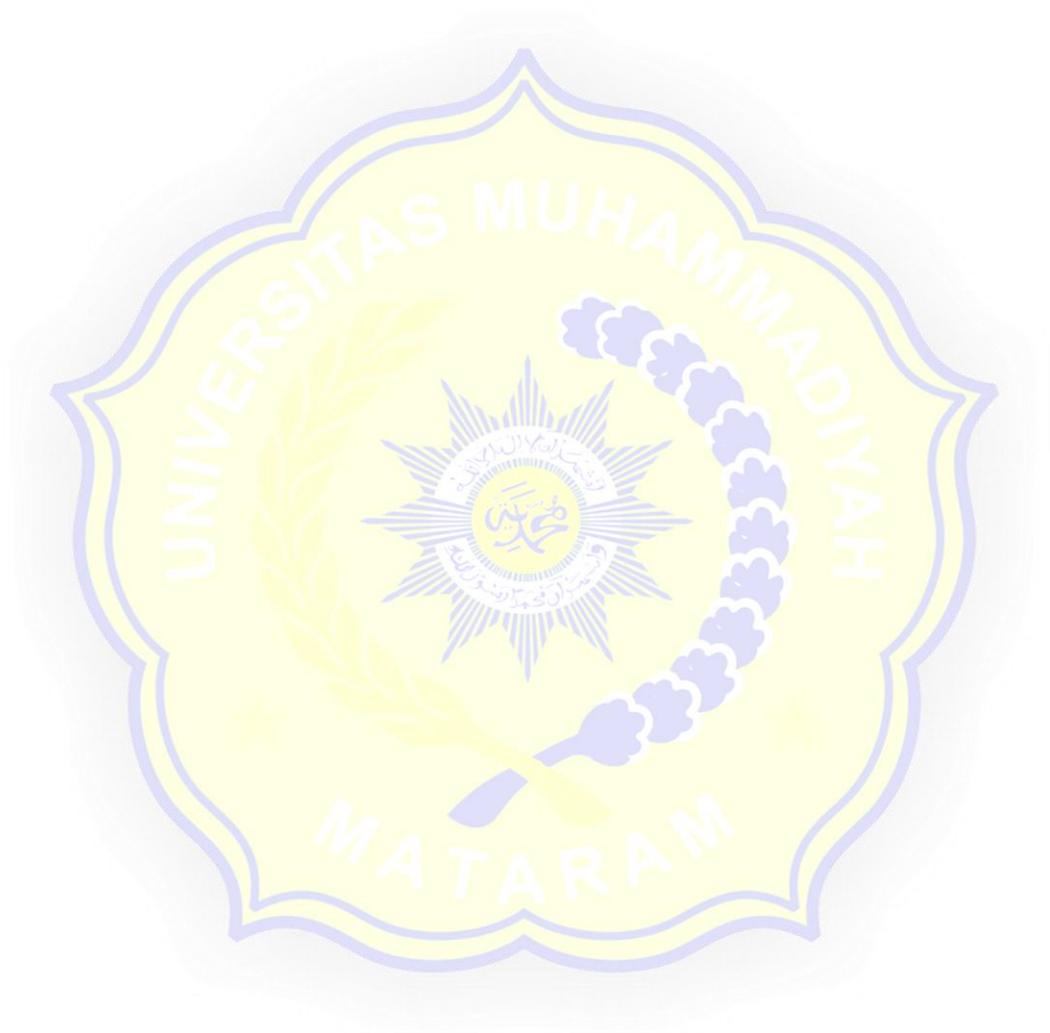
memberikan suaranya dalam pemilihan umum (pemilu). Mereka memiliki pengalaman pertama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemilihan presiden dan wakil presiden. (Bakti, 2012:127)

2.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana variabel diukur. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat berguna bagi peneliti lain yang ingin mempelajari variabel yang sama. Selain itu, definisi operasional menunjukkan bagaimana variabel diukur, atau Anda dapat melihat definisi operasional penelitian, dan peneliti mengetahui variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti, yaitu:

- a. Aspek-Aspek Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa
 1. Peran sebagai suatu kebijakan
 2. Peran sebagai strategi
 3. Peran sebagai alat komunikasi
 4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa
- b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa
 1. Factor ekonomi
 2. Kesadaran politik

3. Penilaian masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah
4. Pengaruh kaum intelektual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Studi kualitatif dapat didefinisikan sebagai studi yang menyediakan data deskriptif tentang bahasa lisan atau tulisan dan perilaku subjek yang dapat diamati, serta data untuk menarik penjelasan dan kesimpulan terperinci tentang masalah yang terkait dengan teori yang ada. (Suyanto, 2005: 166). Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk melihat lebih dekat peran Pemerintah Desa Mantal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019.

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Mantar Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini telah di laksanakan selama 30 hari (satu bulan) dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 22 Januari 2022.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Identifikasi informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik snowball sampling. Selain itu menurut Hamid Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang membantu memberikan informasi tentang status dan status latar belakang penelitian. Selain itu, informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitiannya. Adapun subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa

2. Karang Taruna
3. Tokoh Masyarakat
4. Masyarakat setempat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini Teknik yang dilakukan adalah:

3.4.1 Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi mengamati secara langsung subjek penelitian untuk memantau secara dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2008: 72). Menurut Hadari Nawawi (2005: 100), observasi ini dapat diartikan sebagai mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terjadi pada subjek penelitian. Pengamatan harus konseptual. Oleh karena itu, pengamatan yang dilakukan tidak dilihat sebagai fakta yang terisolasi, tetapi dalam konteks yang logis dan bermakna. Dengan landasan teori yang mendalam, kita lebih mengetahui asumsi dan hipotesis yang perlu diperiksa kebenarannya berdasarkan pengamatan yang seobjektif mungkin. (Nasution, 2009:110).

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang digali langsung dari sumber data melalui percakapan dan tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat rinci karena berusaha menggali informasi dari informan secara holistik dan jelas. (Sotori dan Komariah, 2009:47).

3.4.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi menargetkan data langsung dari lokasi penelitian, seperti buku terkait, peraturan, laporan kegiatan, foto, dan dokumenter. (Ridwan, 2008:77).

3.5 Sumber Data

Data adalah sekumpulan fakta atau peristiwa mentah yang belum diproses dan mungkin tidak dapat diterima oleh pikiran penerima data. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu mengumpulkan data sebelum menyebutnya sebagai informasi. Data tersebut dapat berupa angka, kata, huruf, suara, atau simbol yang dapat digunakan sebagai informasi. Menurut Ridwan (2008: 69), sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data kunci yang diperoleh langsung di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi survei atau dari informan dan sumber yang terkait dengan variabel survei dan peran pemerintah desa. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (interview) dengan orang-orang yang terlibat dalam survei. Peneliti tidak dapat mewawancarai seluruh masyarakat karena keterbatasan waktu yang mereka habiskan untuk melakukan penelitian. Maka peneliti mengambil strategi untuk mewawancarai:

1. Kepala Desa
2. Karang Taruna

3. Tokoh Masyarakat
4. Masyarakat setempat

3.5.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder. Data lain yang diperlukan untuk sumber data sekunder diharapkan dapat berperan dalam mengungkapkan data yang diharapkan, sebagai berikut: B. Dokumen, undang-undang, arsip, dan data lain yang peneliti perlukan untuk menambah data penelitian. Dalam survei ini, data sekunder yang digunakan adalah undang-undang desa, buku atau jurnal tentang otonomi desa, catatan survei lapangan, dan wawancara dengan berbagai informan yang diidentifikasi oleh surveyor sebelum melakukan survei yang terdiri dari foto-foto.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (triangulasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Pengamatan terus menerus memberikan satu bagian data. Data yang diperoleh biasanya bersifat kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan tidak menunjukkan pola yang jelas. (Sugiono,2013:243).

Analisis ini adalah tugas yang sulit dan membutuhkan banyak pekerjaan. Analisis membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual yang tinggi. Karena tidak ada peristiwa khusus lainnya yang dapat dilacak untuk melakukan analisis, setiap peneliti harus menemukan metode unik yang menurutnya sesuai

dengan sifat penelitian. Materi yang sama dapat dikategorikan secara berbeda oleh studi yang berbeda. Dalam penelitian ini, metode analisis datanya adalah kualitatif dalam menelusuri alur kegiatan. Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu (Sugiono, 2013:246-252):

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang membutuhkan tingkat kecerdasan, keluasan, dan kedalaman yang tinggi dalam wawancara. Mengurangi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang penting, fokus pada hal-hal yang penting, dan mencari tim dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data lebih lanjut sesuai kebutuhan. Perangkat elektronik seperti komputer mini dapat mendukung reduksi data dengan menyediakan kode untuk aspek tertentu.

3.6.2 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat, titik tolak, hubungan antar kategori diagram alur, dan sebagainya. Dalam hal ini, teks naratif digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah karena tidak adanya bukti-bukti kuat yang terdapat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke area pengumpulan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang

kredibel. Tujuan penggunaan grafik dan kata-kata adalah untuk menyampaikan efek makna yang mudah dipahami.

